STRATEGI PEMBERDAYAAN POLITIK MASYARAKAT MARGINAL DI KOTA PALU

Moh. Dhiyalhaq Al – Faqih
NPP. 33.0888
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: dhiyalhaq21@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Astika Ummy Athahirah, S.STP., M.Si
Email Pembimbing:

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research GAP: *Political empowerment of marginalized communities in Palu City has not been optimal amid post-disaster vulnerability, economic pressure, limited access to political information, and population-administration problems. The low voter participation in the 2024 Palu mayoral election compared with the national election indicates that democratic participation has not been evenly experienced by vulnerable groups.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze political empowerment strategies for marginalized communities in Palu City.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation. Informants consisted of officials of the Palu City National Unity and Politics Agency, the Palu City Election Commission, the Forum for National Assimilation, and representatives of marginalized communities, including people with disabilities, disaster survivors living in permanent housing areas, residents of slum or uninhabitable housing areas, and low-income groups.* ***Result:*** *The findings show that political empowerment has been implemented through information provision, political education, and institutional forums, but it remains uneven and has not fully addressed the specific barriers of marginalized communities. In the choice dimension, information and political education are available but have not reached all target groups. In the agency dimension, self-confidence, bargaining power, and the courage to express aspirations remain weak. In the participation/achievement dimension, involvement is still mostly procedural and has not yet produced substantial policy influence.* ***Conclusion:*** *The priority strategies are thematic area-based political education, mobile population-administration and election helpdesks, critical political literacy and anti-vote-buying campaigns, and community-based training of trainers for marginalized citizen cadres.*

Keywords: *Marginalized Communities; Political Empowerment; Political Participation*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/ *Research GAP*): Pemberdayaan politik masyarakat marginal di Kota Palu belum optimal di tengah kerentanan pascabencana, tekanan ekonomi, keterbatasan akses informasi politik, dan persoalan administrasi kependudukan. Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Palu 2024 dibandingkan Pemilu menunjukkan bahwa partisipasi demokratis belum merata dirasakan oleh kelompok rentan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan politik masyarakat marginal di Kota Palu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Informan terdiri atas unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, KPU Kota Palu, Forum Pembauran Kebangsaan, serta perwakilan masyarakat marginal, meliputi penyandang disabilitas, penyintas bencana yang tinggal di hunian tetap, penghuni kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni, dan kelompok ekonomi bawah. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan politik telah berjalan melalui penyediaan informasi, pendidikan politik, dan forum kelembagaan, tetapi belum merata serta belum sepenuhnya menjawab hambatan khusus masyarakat marginal. Pada dimensi pilihan, akses informasi dan pendidikan politik tersedia, namun belum menjangkau seluruh sasaran. Pada dimensi agensi, kepercayaan diri, daya tawar, dan keberanian menyampaikan aspirasi masih lemah. Pada dimensi partisipasi/prestasi, keterlibatan politik masih dominan bersifat prosedural dan belum menghasilkan pengaruh kebijakan yang kuat. **Kesimpulan:** Strategi prioritas yang perlu dikembangkan adalah pendidikan politik tematik berbasis wilayah, layanan jemput bola administrasi kependudukan dan pemilu, literasi politik kritis dan kampanye antipolitik uang, serta *training of trainers* kader warga marginal berbasis komunitas.
Kata Kunci: Masyarakat Marginal; Partisipasi Politik; Pemberdayaan Politik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Palu merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan mobilitas sosial di Provinsi Sulawesi Tengah. Posisi ini membuat Kota Palu memiliki dinamika politik lokal yang penting, tetapi juga menghadapi persoalan kerentanan sosial yang tidak sederhana. Pascabencana gempa, tsunami, dan likuefaksi tahun 2018, sebagian warga mengalami perubahan ruang hidup, kehilangan mata pencaharian, relokasi ke hunian tetap, serta persoalan administratif yang memengaruhi akses terhadap pelayanan publik. Dalam konteks demokrasi lokal, kerentanan tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial ekonomi, tetapi juga pada kemampuan warga untuk mengakses informasi politik, menyampaikan aspirasi, dan menggunakan hak politik secara bermakna.

Masyarakat marginal dalam penelitian ini dipahami sebagai kelompok yang berada di pinggir arus utama pembangunan dan memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya, pelayanan, informasi, serta pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Kelompok tersebut mencakup masyarakat miskin, penganggur, penyandang disabilitas, penghuni kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni, penyintas bencana yang tinggal di hunian tetap, pedagang kecil, tukang parkir, serta warga lain yang bergantung pada pendapatan harian. Kelompok ini rentan tertinggal dalam proses politik karena waktu, biaya, jarak, informasi, dan rasa percaya diri politik sering kali tidak memadai.

Data dalam skripsi menunjukkan bahwa penduduk miskin Kota Palu pada Maret 2024 berada pada angka 5,94 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka Agustus 2024 berada pada angka 5,63 persen. Kota Palu juga masih memiliki kelompok penyandang disabilitas, warga terdampak rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, dan penyintas bencana yang tersebar di sejumlah lokasi relokasi. Keberadaan hunian tetap di wilayah Tondo, Talise, Petobo, Duyu, dan Balaroa menjadi konteks penting karena sebagian warga telah berpindah tempat tinggal, sementara integrasi sosial, administratif, dan informasi politik belum selalu berjalan merata. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan politik masyarakat marginal tidak dapat dilepaskan dari persoalan sosial, ekonomi, spasial, dan pascabencana.

Permasalahan utama yang mendorong penelitian ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Palu 2024 dibandingkan partisipasi pada Pemilu. Berdasarkan data yang digunakan dalam skripsi, partisipasi Pilkada Kota Palu 2024 berada pada angka 62,51 persen, sedangkan partisipasi Pemilu berada pada kisaran lebih tinggi. Kecamatan Palu Timur, Palu Selatan, Palu Barat, dan Mantikulore menjadi wilayah yang penting diperhatikan karena memiliki karakteristik masyarakat marginal, kegiatan perdagangan, dan lokasi hunian tetap. Rendahnya partisipasi di wilayah tersebut bukan hanya disebabkan oleh kurangnya kemauan politik, melainkan juga oleh keterbatasan akses informasi, tekanan ekonomi harian, lokasi hunian yang jauh dari pusat informasi, dan lemahnya ruang pemberdayaan yang berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi penting karena selama ini pendidikan politik sering kali hanya dipahami sebagai kegiatan sosialisasi menjelang pemilu atau pilkada. Padahal, pemberdayaan politik menuntut proses yang lebih luas. Kabeer (1999) menjelaskan pemberdayaan sebagai proses perluasan sumber daya, agensi, dan capaian, sedangkan Sundstrom et al. (2017) menempatkan pilihan, agensi, dan partisipasi/prestasi sebagai dimensi utama pemberdayaan politik. Artinya, partisipasi tidak cukup diukur dari kehadiran pemilih di TPS, tetapi juga dari kemampuan warga memahami haknya, menyampaikan aspirasi, menolak tekanan politik, dan mendorong respons pemerintah terhadap kepentingannya.

Sejumlah kajian yang ditulis oleh dosen atau penulis berafiliasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri memperkuat urgensi penelitian ini. Pambayun et al. (2021) menunjukkan bahwa literasi politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah eks daerah tertinggal belum berjalan maksimal karena keterbatasan jangkauan, frekuensi kegiatan, dan pemanfaatan media sosial. Ridwan et al. (2023) juga menemukan bahwa Program Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik belum efektif ketika masyarakat belum mengetahui program tersebut dengan baik dan fasilitas pembelajaran pemilu belum terlaksana secara optimal. Ricky & Rahimallah (2022) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi prasyarat penting untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sementara itu, Mulyana & Tambunan (2021) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah membutuhkan peran aktif Kesbangpol, kerja sama dengan KPU, pemerintah tingkat bawah, RT/RW, serta partai politik. Taek et al. (2020) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memerlukan kinerja perangkat daerah yang responsif agar program tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pemberdayaan politik masyarakat marginal di Kota Palu perlu diarahkan pada perluasan akses informasi, pendidikan politik yang tepat sasaran, penguatan kelembagaan, dan pelayanan yang lebih dekat dengan kelompok rentan.

Kondisi masyarakat marginal di Kota Palu menunjukkan adanya kesenjangan antara hak politik yang secara formal dijamin oleh negara dan kemampuan nyata warga untuk menggunakan hak tersebut. Warga yang bekerja sebagai pedagang kecil atau tukang parkir, misalnya, sering menempatkan aktivitas ekonomi harian sebagai prioritas karena meninggalkan pekerjaan berarti kehilangan pendapatan. Penyintas bencana yang tinggal di hunian tetap juga menghadapi hambatan akses informasi karena sebagian kegiatan sosialisasi masih bertumpu pada wilayah atau jaringan sosial lama. Bagi penyandang disabilitas, hambatan dapat muncul dari fasilitas, metode komunikasi, dan belum kuatnya ruang aman yang membuat mereka percaya diri untuk terlibat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya memotret rendahnya partisipasi politik, tetapi merumuskan strategi pemberdayaan politik yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Palu dan lembaga terkait. Bell & Reed (2021) menekankan bahwa pengambilan keputusan inklusif harus memberi ruang agar warga tidak hanya menerima informasi, tetapi ikut menentukan arah keputusan. Dalam konteks Indonesia, Chandra SY & Irawan (2022) juga menegaskan pentingnya perluasan makna partisipasi masyarakat agar tidak berhenti pada kehadiran formal, tetapi menjadi partisipasi yang bermakna. Selain itu, Dahlum et al. (2022) menunjukkan bahwa pemberdayaan politik berkaitan

dengan kualitas pembangunan karena warga yang berdaya lebih mampu mendorong kebijakan yang responsif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi praktis bagi Kesbangpol, KPU, forum kemasyarakatan, dan pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas demokrasi lokal yang lebih inklusif.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research GAP)

Kesenjangan utama dalam penelitian ini terletak pada perbedaan antara ketersediaan kegiatan pendidikan politik dengan kebutuhan riil masyarakat marginal. Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu telah menjalankan sosialisasi dan pendidikan politik, tetapi kegiatan tersebut belum sepenuhnya dirancang berdasarkan hambatan khas kelompok marginal. Materi sosialisasi masih cenderung umum, metode penyampaian belum selalu menyesuaikan kondisi pekerjaan harian, lokasi kegiatan belum selalu dekat dengan komunitas rentan, dan tindak lanjut pemberdayaan setelah kegiatan masih terbatas. Akibatnya, sebagian masyarakat hanya menerima informasi dasar tentang pentingnya memilih, tetapi belum memperoleh kemampuan untuk terlibat lebih jauh dalam proses politik.

Kesenjangan tersebut sejalan dengan beberapa kajian IPDN yang menunjukkan bahwa ketersediaan program belum selalu identik dengan keberdayaan masyarakat. Pambayun et al. (2021) dan Ridwan et al. (2023) memperlihatkan bahwa program literasi atau pendidikan politik dapat berjalan, tetapi belum optimal apabila jangkauan, sosialisasi, dan sarana pembelajarannya belum menyentuh kelompok sasaran secara langsung. Ricky & Rahimallah (2022) mempertegas bahwa partisipasi masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi yang mudah diakses, sedangkan Mulyana dan Mulyana & Tambunan (2021) menekankan pentingnya kolaborasi Kesbangpol, KPU, pemerintah lokal, dan partai politik dalam membangun budaya politik masyarakat. Adapun Taek et al. (2020) menunjukkan bahwa pemberdayaan memerlukan dukungan kinerja perangkat daerah agar program tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kesenjangan penelitian ini bukan hanya terletak pada rendahnya partisipasi Pilkada, melainkan juga pada belum kuatnya desain pemberdayaan politik yang berbasis hambatan nyata masyarakat marginal.

Kesenjangan berikutnya tampak pada hubungan antara angka partisipasi dan posisi politik warga. Angka partisipasi yang rendah pada Pilkada Kota Palu menunjukkan bahwa sebagian warga belum memiliki kondisi sosial yang memadai untuk menggunakan hak pilih. Namun, persoalan yang lebih mendasar adalah partisipasi warga yang hadir pun belum tentu bermakna. Banyak warga marginal masih merasa aspirasi mereka hanya didengar saat kampanye, tetapi tidak selalu ditindaklanjuti setelah pemilihan selesai. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan politik tidak bisa berhenti pada ajakan memilih, melainkan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas warga untuk mengawal aspirasi dan menuntut respons kebijakan.

Kesenjangan lain adalah belum kuatnya integrasi antara data kemarginalan dan desain program politik. Data kemiskinan, pengangguran, disabilitas, kawasan kumuh, rumah tidak layak huni, serta sebaran hunian tetap sebenarnya dapat digunakan untuk menentukan sasaran pendidikan politik yang lebih presisi. Akan tetapi, pendekatan program masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya berbasis peta kerentanan. Kondisi ini menyebabkan kelompok yang paling membutuhkan dukungan politik justru berpotensi menjadi kelompok yang paling sulit dijangkau.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh akses informasi, kualitas pendidikan politik, kondisi sosial ekonomi, serta kepercayaan terhadap lembaga. Bell & Reed (2021) menekankan bahwa pengambilan keputusan yang inklusif membutuhkan ruang partisipasi yang mampu menempatkan warga bukan hanya sebagai penerima informasi, melainkan sebagai pihak yang ikut menentukan arah keputusan. Temuan ini sejalan dengan kebutuhan

masyarakat marginal Kota Palu yang tidak cukup hanya diberi sosialisasi, tetapi perlu dilibatkan dalam forum yang aman, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Dahlum et al. (2022) menjelaskan bahwa pemberdayaan politik memiliki hubungan dengan kualitas pembangunan karena warga yang berdaya dapat mendorong kebijakan yang lebih responsif. Dalam konteks Kota Palu, pemberdayaan politik masyarakat marginal tidak hanya relevan untuk menaikkan partisipasi pemilih, tetapi juga untuk memastikan kebijakan pemulihan pascabencana, layanan administrasi, dan perlindungan sosial lebih sesuai dengan kebutuhan warga rentan. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan politik perlu memadukan pendidikan politik, penguatan komunitas, dan perbaikan pelayanan publik.

Penelitian Fitriyah (2021) mengenai tantangan pemilih difabel menunjukkan bahwa aksesibilitas menjadi syarat penting bagi partisipasi politik yang adil. Kajian Dewi et al. (2022) juga menekankan peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan meminimalkan golput, terutama melalui sosialisasi yang tepat sasaran. Penelitian-penelitian tersebut memperkuat argumen bahwa rendahnya partisipasi politik kelompok marginal bukan hanya persoalan kesadaran individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga menyediakan akses, informasi, dan ruang politik yang inklusif.

Selain itu, lima referensi tambahan digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan pembahasan penelitian. Arnstein (1969) memperkuat argumen bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada kehadiran formal, tetapi harus bergerak menuju pengaruh dan kontrol warga dalam proses pengambilan keputusan. Rowlands (1995) memperkuat dimensi agensi karena pemberdayaan berkaitan dengan tumbuhnya kekuatan dari dalam diri, kemampuan untuk bertindak, dan kekuatan kolektif masyarakat. Gaventa (2006) membantu menjelaskan bahwa kelompok marginal sering sulit masuk ke ruang politik karena adanya relasi kuasa dan keterbatasan ruang partisipasi. Fung (2006) memperluas pemahaman mengenai variasi partisipasi dalam tata kelola yang kompleks, sedangkan Ansell & Gash (2008) mendukung strategi pemberdayaan politik berbasis kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, forum kemasyarakatan, dan komunitas warga.

Sintesis dari rangkaian penelitian terdahulu di atas menunjukkan adanya kesenjangan kajian *(research gap)* yang nyata, di mana mayoritas studi cenderung mengkaji intervensi partisipasi politik secara parsial, baik dengan membatasi fokus pada satu jenis kelompok rentan saja (seperti kelompok disabilitas saja) atau hanya melihat peran sosialisasi makro dari institusi penyelenggara pemilu secara formal. Belum ada kajian yang secara integratif meneliti irisan kerentanan berlapis lintas kelompok marginal mulai dari penyandang disabilitas, penyintas bencana di hunian tetap (Huntap), penghuni kawasan kumuh, hingga pekerja informal ekonomi bawah dalam satu lokus wilayah pascabencana. Di sinilah posisi penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menempatkan tata kelola kolaboratif lokal sebagai pisau analisis untuk menguji hubungan kausalitas multidimensi antara ketersediaan sumber daya pilihan *(choice)* dan kapasitas mentalitas *(agency)* warga sebelum bermuara pada capaian partisipasi yang bermakna.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap strategi pemberdayaan politik masyarakat marginal di Kota Palu dengan mempertimbangkan konteks pascabencana, kemiskinan, kawasan perdagangan, dan hunian tetap. Penelitian ini tidak hanya membahas partisipasi politik secara umum, tetapi menghubungkannya dengan dimensi pilihan, agensi, dan partisipasi/prestasi. Dengan pendekatan ini, rendahnya partisipasi Pilkada tidak diposisikan semata-mata sebagai akibat apatisme warga, melainkan sebagai hasil dari keterbatasan sumber daya, lemahnya kepercayaan diri politik, dan belum kuatnya hasil nyata dari partisipasi.

Secara eksplisit, kebaruan ilmiah penelitian ini membedakan diri dari penelitian terdahulu melalui tiga aspek utama, yaitu substansi objek, kerangka teoretis, dan lokus kajian. Berbeda dengan penelitian Fitriyah (2021) yang membatasi analisis pada pemilih disabilitas, penelitian ini menawarkan kebaruan substansi dengan mengintegrasikan lintas kelompok marginal perkotaan yang mengalami dislokasi

spasial dan kerentanan administrasi kependudukan. Selanjutnya, jika kajian Dewi et al. (2022) berfokus pada fungsi kelembagaan KPU secara makro dalam menekan angka golput, penelitian ini memberikan kebaruan konseptual dengan mengadopsi teori Sundstrom et al. (2017) untuk membongkar bahwa kegagalan partisipasi prosedural di TPS berakar dari lemahnya agensi psikososial warga akibat tekanan struktur sosial ekonomi. Berbeda pula dengan kajian Pambayun et al. (2021) dan Ridwan et al. (2023) yang berfokus pada efektivitas literasi secara administratif, penelitian ini mengisi kekosongan studi sosiologi politik lokal dengan menyajikan model penguatan demokrasi inklusif berbasis karakteristik wilayah pemulihan pascabencana di Kota Palu.

Penelitian ini juga memberikan kebaruan praktis melalui penyusunan strategi berbasis kebutuhan lokal. Strategi yang dirumuskan tidak bersifat umum, tetapi diarahkan pada pendidikan politik tematik berbasis wilayah, layanan jemput bola administrasi dan pemilu, literasi politik kritis, kampanye antipolitik uang, dan kaderisasi warga marginal. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi bagi penguatan demokrasi lokal di Kota Palu melalui pendekatan pemberdayaan yang lebih menyentuh akar masalah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan politik masyarakat marginal di Kota Palu. Tujuan tersebut diarahkan untuk memahami kondisi pemberdayaan politik masyarakat marginal berdasarkan dimensi pilihan, agensi, dan partisipasi/prestasi, serta merumuskan strategi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama penyelenggara pemilu dan forum kemasyarakatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan pemberdayaan politik masyarakat marginal tidak cukup dijelaskan melalui angka partisipasi, tetapi memerlukan pemahaman mendalam mengenai pengalaman, hambatan, dan makna yang dirasakan oleh warga serta lembaga yang terlibat. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis menggali bagaimana akses informasi diterima, bagaimana warga memaknai hak politiknya, dan bagaimana lembaga menyusun program pemberdayaan.

Penelitian dilaksanakan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dari tanggal 05 Januari sampai dengan 25 Januari 2026 atau selama kurang lebih 21 hari. Lokasi penelitian mencakup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, Forum Pembauran Kebangsaan, serta beberapa lokasi yang berkaitan dengan masyarakat marginal, seperti kawasan hunian tetap, kawasan perdagangan/pasar, kawasan permukiman rentan, dan lingkungan masyarakat ekonomi bawah. Kota Palu dipilih karena memiliki pengalaman bencana besar tahun 2018, sebaran hunian tetap, kantong kemiskinan, kawasan perdagangan, dan angka partisipasi Pilkada yang masih perlu diperkuat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive untuk unsur lembaga karena mereka dianggap memiliki kewenangan, pengetahuan, dan pengalaman langsung mengenai pendidikan politik, sosialisasi pemilih, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, informan masyarakat marginal dipilih secara snowball karena karakteristik kelompok marginal tidak selalu mudah dijangkau melalui daftar formal dan membutuhkan rekomendasi dari informan awal.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu yang membidangi politik dalam negeri atau ketahanan politik, serta pejabat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang membidangi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Keduanya dipilih sebagai informan kunci karena memiliki mandat kelembagaan dan informasi utama terkait program pendidikan politik, sosialisasi pemilih, dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Informan pendukung terdiri atas Ketua Forum Pembauran Kebangsaan dan

perwakilan masyarakat marginal, meliputi penyandang disabilitas, penyintas bencana yang tinggal di hunian tetap, penghuni kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni, pedagang kecil, tukang parkir, serta kelompok ekonomi bawah.

Data sekunder digunakan untuk memperkuat konteks penelitian. Data tersebut mencakup dokumen kebijakan, data partisipasi Pilkada Kota Palu 2024, data kemiskinan, data pengangguran, data penyandang disabilitas, dokumen kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, serta dokumen terkait hunian tetap penyintas bencana. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Data hasil wawancara dan dokumentasi dipilih sesuai fokus penelitian, lalu disusun berdasarkan dimensi pilihan, agensi, dan partisipasi/prestasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi dari lembaga, masyarakat marginal, dokumen, dan hasil observasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan politik masyarakat marginal di Kota Palu telah berjalan, tetapi belum merata, belum spesifik, dan belum sepenuhnya mengubah posisi warga marginal dari objek sosialisasi menjadi subjek politik. Untuk membaca kondisi tersebut, penulis menggunakan tiga dimensi pemberdayaan politik, yaitu pilihan, agensi, dan partisipasi/prestasi. Ketiga dimensi ini saling berkaitan. Pilihan berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dan akses informasi. Agensi berkaitan dengan kemampuan warga bertindak secara mandiri. Partisipasi atau prestasi berkaitan dengan hasil nyata dari tindakan politik warga.

3.1. Dimensi Pilihan *(Choice/Resources)*

Dimensi pilihan menjadi fondasi pemberdayaan politik karena warga hanya dapat terlibat secara bermakna apabila memiliki sumber daya dan akses yang memadai. Dalam konteks Kota Palu, pilihan berkaitan dengan akses terhadap informasi politik, pendidikan politik, fasilitas pemilu, dokumen kependudukan, lokasi TPS, dan kesempatan mengikuti forum warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Palu, Kesbangpol Kota Palu, FPK, dan FKDM telah memiliki peran dalam menyediakan informasi dan membuka ruang sosialisasi. Namun, ketersediaan program tersebut belum otomatis menjamin bahwa seluruh masyarakat marginal dapat mengaksesnya.

Akses informasi politik masih menjadi kendala utama. Sebagian kegiatan sosialisasi masih bersifat umum, berpusat pada forum formal, dan belum sepenuhnya menyesuaikan karakter kelompok marginal. Warga yang bekerja harian, seperti pedagang sayur, penjual ikan, petani, tukang parkir, dan pekerja informal, memiliki keterbatasan waktu untuk hadir dalam kegiatan yang berlangsung lama atau dilaksanakan pada jam kerja. Bagi mereka, menghadiri kegiatan politik dapat berarti kehilangan pendapatan harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses politik tidak hanya berkaitan dengan undangan atau ketersediaan informasi, tetapi juga kemampuan ekonomi dan waktu untuk mengakses informasi tersebut.

Pada masyarakat hunian tetap, hambatan pilihan juga muncul dari jarak dan perubahan lingkungan sosial. Warga penyintas bencana yang direlokasi ke Huntap Talise, Tondo, Petobo, Duyu, atau Balaroa tidak selalu berada dalam jejaring informasi politik yang sama seperti sebelum relokasi. Beberapa warga merasa informasi politik lebih banyak beredar di lingkungan lama atau melalui tokoh tertentu, sedangkan komunitas Huntap belum selalu menjadi sasaran khusus. Akibatnya, warga yang sebenarnya membutuhkan penguatan informasi justru dapat tertinggal dalam sosialisasi politik dan administrasi pemilih.

Bagi penyandang disabilitas, dimensi pilihan berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang ramah disabilitas, metode komunikasi yang mudah dipahami, dan ruang partisipasi yang aman. Jika informasi hanya disampaikan secara umum tanpa memperhatikan kebutuhan komunikasi, mobilitas, atau pendampingan, maka hak politik yang secara formal tersedia belum sepenuhnya menjadi pilihan yang

nyata. Hal ini memperlihatkan bahwa dimensi pilihan menuntut adanya penyesuaian program sesuai kondisi warga, bukan sekadar penyebaran informasi secara seragam.

Analisis pembahasan pada dimensi pilihan menunjukkan bahwa pemberdayaan politik masyarakat marginal di Kota Palu telah memiliki dasar kelembagaan, tetapi belum cukup kuat pada aspek jangkauan, kedalaman, dan kesesuaian sasaran. Penyediaan informasi dasar oleh KPU dan pendidikan politik oleh Kesbangpol merupakan langkah awal yang penting, namun belum sepenuhnya menjawab hambatan ekonomi, jarak, waktu kerja, disabilitas, dan relokasi pascabencana. Dengan demikian, rendahnya partisipasi politik tidak dapat dijelaskan sebagai kurangnya kesadaran warga semata, melainkan sebagai akibat dari pilihan politik yang belum benar-benar tersedia secara adil bagi semua kelompok.

3.2. Dimensi Agensi *(Agency)*

Dimensi agensi berkaitan dengan kemampuan dan keberanian masyarakat marginal untuk bertindak secara mandiri dalam ruang politik. Agensi mencakup kepercayaan diri, kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan mengambil keputusan politik sendiri, daya tawar terhadap aktor politik, kemampuan mengorganisir diri, dan keberanian menolak tekanan atau dominasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agensi masyarakat marginal di Kota Palu masih relatif lemah meskipun ruang formal untuk menyampaikan aspirasi telah tersedia.

Dari sisi kelembagaan, Kesbangpol, KPU, dan FPK/FKDM menyatakan telah membuka ruang komunikasi bagi masyarakat. KPU melibatkan kelompok pemilih rentan dalam forum sosialisasi. Kesbangpol membuka ruang pengaduan dan fasilitasi apabila terdapat persoalan hak politik, termasuk dalam kasus administrasi pemilih. FPK juga mendorong pendekatan komunikasi yang memberi perlindungan kepada masyarakat marginal. Namun, ruang tersebut belum selalu dimanfaatkan secara aktif oleh warga karena sebagian masyarakat masih merasa suaranya tidak cukup berpengaruh.

Kelemahan agensi terlihat dari rendahnya kepercayaan diri warga untuk menyampaikan aspirasi kepada pejabat, dewan, atau tokoh politik. Sebagian informan masyarakat marginal menilai bahwa aspirasi mereka sering hanya dicatat saat kampanye atau forum, tetapi tidak selalu ditindaklanjuti. Pengalaman seperti ini membuat warga menjadi ragu untuk terlibat lebih jauh. Dalam jangka panjang, pengalaman tidak didengar dapat menurunkan efikasi politik, yaitu keyakinan bahwa suara warga memiliki arti dalam proses politik.

Agensi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial dan tekanan politik. Warga dengan kondisi ekonomi lemah lebih rentan mengikuti arahan orang lain, menerima janji bantuan, atau mempertimbangkan pilihan berdasarkan informasi dari tetangga dan tokoh tertentu tanpa proses pertimbangan kritis yang kuat. Hal ini bukan berarti masyarakat marginal tidak memiliki pilihan, tetapi pilihan mereka berada dalam situasi sosial yang tidak setara. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, daya tawar warga terhadap aktor politik menjadi rendah dan mereka lebih mudah menjadi objek mobilisasi.

Kemampuan mengorganisir diri juga belum kuat. Sebagian warga marginal belum terlibat dalam organisasi politik, komunitas warga, atau forum yang secara khusus memperjuangkan hak politik. Keterlibatan mereka lebih banyak bersifat pasif atau sesekali hadir ketika diundang. Kondisi ini berbeda dengan pemberdayaan politik yang ideal, yaitu ketika warga mampu membentuk jaringan, menyusun tuntutan, mengadvokasi kepentingan, dan mengawasi tindak lanjut kebijakan. Dengan demikian, agensi masyarakat marginal belum tumbuh menjadi kekuatan kolektif yang stabil.

Analisis pembahasan pada dimensi agensi menunjukkan bahwa masalah utama masyarakat marginal bukan hanya tidak mengetahui politik, tetapi belum memiliki keberanian dan daya tawar yang cukup untuk bertindak sebagai subjek politik. Program pendidikan politik yang bersifat ceramah belum memadai untuk membangun agensi karena warga membutuhkan ruang dialog, pendampingan, pelatihan advokasi, dan penguatan komunitas. Oleh sebab itu, strategi pemberdayaan politik perlu mengubah pola pendekatan dari sekadar memberi informasi menjadi membangun kapasitas warga

untuk berani bersuara, menyusun aspirasi, menolak politik uang, dan memperjuangkan kepentingannya secara kolektif.

3.3. Dimensi Partisipasi/Prestasi *(Participation/Achievements)*

Dimensi partisipasi atau prestasi merupakan hasil dari terpenuhinya pilihan dan agensi. Dalam penelitian ini, partisipasi tidak hanya dipahami sebagai penggunaan hak pilih, tetapi juga keterlibatan dalam organisasi, diskusi publik, forum warga, kampanye, penyampaian aspirasi, serta kemampuan memengaruhi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat marginal di Kota Palu masih dominan bersifat prosedural. Sebagian warga menggunakan hak pilih, tetapi belum banyak terlibat dalam proses politik yang lebih luas.

Rendahnya partisipasi Pilkada Kota Palu 2024 menjadi indikator penting. Partisipasi sebesar 62,51 persen menunjukkan bahwa masih terdapat jarak antara hak pilih formal dan praktik partisipasi warga. Di sejumlah kecamatan, seperti Palu Timur, Palu Selatan, Palu Barat, dan Mantikulore, partisipasi yang rendah berkaitan dengan konsentrasi aktivitas perdagangan, tekanan ekonomi harian, serta keberadaan warga hunian tetap yang jauh dari akses informasi. Bagi pedagang pasar, hari pemungutan suara dapat dipersepsikan sebagai hari kerja biasa. Jika meninggalkan lapak berarti kehilangan pembeli dan pendapatan, maka pilihan untuk datang ke TPS menjadi berat.

Pada tingkat yang lebih substantif, partisipasi masyarakat marginal juga belum banyak menghasilkan prestasi politik berupa perubahan kebijakan atau respons nyata pemerintah. Beberapa informan merasa bahwa keikutsertaan mereka dalam kegiatan politik belum berdampak langsung terhadap perbaikan kondisi hidup. Mereka dapat menerima sosialisasi, hadir dalam forum, atau menggunakan hak pilih, tetapi setelah proses politik selesai, masalah akses ekonomi, administrasi, hunian, dan informasi masih tetap dirasakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi belum sepenuhnya menjadi saluran perubahan.

Keterlibatan dalam organisasi politik atau komunitas juga masih terbatas. Sebagian warga lebih dekat dengan jaringan pekerjaan dan keluarga dibandingkan organisasi politik formal. Bagi masyarakat marginal, keterlibatan organisasi sering dianggap membutuhkan waktu, biaya, dan keberanian sosial. Padahal, organisasi dan komunitas dapat menjadi ruang penting untuk meningkatkan kapasitas kolektif. Tanpa organisasi yang kuat, aspirasi warga cenderung disampaikan secara individu dan mudah diabaikan.

Analisis pembahasan pada dimensi partisipasi/prestasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat marginal di Kota Palu belum dapat disebut sepenuhnya bermakna. Kehadiran di TPS atau keikutsertaan dalam sosialisasi belum otomatis menghasilkan pengaruh terhadap kebijakan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa partisipasi hanya akan berkualitas apabila dimensi pilihan dan agensi sudah terpenuhi lebih dahulu. Karena itu, strategi peningkatan partisipasi tidak cukup dilakukan dengan ajakan memilih, tetapi harus memperbaiki akses informasi, mengurangi hambatan ekonomi dan fisik, membangun kepercayaan diri politik, serta memastikan aspirasi warga ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.

3.4. Strategi Pemberdayaan Politik Masyarakat Marginal di Kota Palu

Berdasarkan temuan pada dimensi pilihan, agensi, dan partisipasi/prestasi, strategi pemberdayaan politik masyarakat marginal di Kota Palu perlu diarahkan pada penguatan akses informasi, peningkatan keberanian dan kapasitas warga, serta penciptaan partisipasi yang berdampak pada kebijakan. Strategi disusun bukan berdasarkan pembahasan faktor-faktor terpisah, melainkan berdasarkan masalah utama yang muncul dari hasil penelitian pada ketiga dimensi tersebut.

Strategi yang dirumuskan bertujuan mengubah posisi masyarakat marginal dari objek sosialisasi menjadi subjek politik yang mampu memahami haknya, menyampaikan aspirasi, menolak tekanan politik, dan terlibat dalam proses demokrasi lokal secara lebih bermakna. Adapun strategi prioritas yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.
Strategi prioritas pemberdayaan politik masyarakat marginal di Kota Palu

Strategi Prioritas	Arah Pelaksanaan
Pendidikan politik tematik berbasis wilayah	Kegiatan disusun berdasarkan karakter wilayah, seperti pasar, hunian tetap, kawasan pinggiran, dan komunitas disabilitas.
Helpdesk administrasi kependudukan dan pemilu keliling	Layanan jemput bola untuk memeriksa status pemilih, dokumen kependudukan, lokasi TPS, dan hak politik warga marginal.
Literasi politik kritis dan kampanye antipolitik uang	Materi diarahkan pada kemampuan membaca janji politik, menolak tekanan, dan memahami konsekuensi politik uang bagi kepentingan warga.
Training of trainers kader warga marginal	Kader dari komunitas pasar, Huntap, disabilitas, dan kelompok ekonomi bawah dilatih menjadi penyambung informasi dan aspirasi.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil penelitian 2026

Strategi pendidikan politik tematik berbasis wilayah diperlukan karena masyarakat marginal tidak memiliki hambatan yang sama. Pedagang pasar membutuhkan kegiatan yang tidak mengganggu waktu berjualan, warga Huntap membutuhkan sosialisasi yang datang langsung ke komunitas relokasi, penyandang disabilitas membutuhkan metode komunikasi yang aksesibel, sedangkan kelompok ekonomi bawah membutuhkan materi yang dekat dengan masalah bantuan sosial, layanan publik, dan hak warga. Dengan cara ini, pendidikan politik tidak lagi bersifat seragam, tetapi menyesuaikan kebutuhan nyata warga.

Strategi *helpdesk* administrasi kependudukan dan pemilu keliling penting karena persoalan dokumen dan status pemilih dapat menjadi penghalang awal partisipasi. Warga yang berpindah karena relokasi pascabencana, warga yang mobilitasnya terbatas, dan warga yang tidak terbiasa memeriksa data pemilih membutuhkan layanan yang proaktif. Layanan ini dapat dilakukan melalui kerja sama Kesbangpol, KPU, Dukcapil, kelurahan, RT/RW, dan tokoh komunitas. Dengan demikian, pemberdayaan politik tidak hanya berbentuk penyuluhan, tetapi juga bantuan konkret untuk memastikan warga memiliki syarat administratif dalam menggunakan hak politik.

Strategi literasi politik kritis dan kampanye antipolitik uang menjadi penting karena masyarakat marginal rentan menjadi sasaran transaksi politik. Kerentanan ekonomi dapat membuat bantuan sesaat terlihat lebih nyata dibandingkan janji program jangka panjang. Oleh karena itu, literasi politik harus menjelaskan dampak politik uang terhadap kualitas pelayanan publik, keberlanjutan bantuan, dan posisi tawar masyarakat setelah pemilihan. Materi harus disampaikan dengan bahasa sederhana dan contoh sehari-hari agar mudah dipahami oleh pedagang, pekerja informal, dan warga Huntap.

Strategi *training of trainers* kader warga marginal menjadi kunci keberlanjutan pemberdayaan. Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu tidak selalu dapat menjangkau seluruh warga secara langsung. Karena itu, diperlukan kader dari komunitas itu sendiri yang memahami bahasa, waktu, dan persoalan warga. Kader dapat membantu menyebarkan informasi politik, mengumpulkan aspirasi, menghubungkan warga dengan layanan administrasi, dan menjaga ruang dialog tetap hidup setelah

kegiatan sosialisasi selesai. Strategi ini menggeser posisi masyarakat marginal dari objek program menjadi bagian dari pelaksana pemberdayaan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sama halnya dengan Bell & Reed (2021), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi yang inklusif tidak cukup hanya dimaknai sebagai kehadiran warga dalam forum atau pemungutan suara. Partisipasi harus memberi ruang bagi warga untuk berbicara, didengar, dan ikut memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Kota Palu, temuan penelitian memperkuat pandangan tersebut karena masyarakat marginal masih menghadapi hambatan akses informasi, waktu kerja, jarak hunian, dan rasa percaya diri politik sehingga belum sepenuhnya mampu berpartisipasi secara bermakna.

Berbeda dengan penelitian Fitriyah (2021) yang lebih menekankan tantangan partisipasi pemilih disabilitas, penelitian ini memperluas fokus pada berbagai kelompok marginal, seperti penyandang disabilitas, penyintas bencana di hunian tetap, pedagang kecil, tukang parkir, penghuni kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni, dan kelompok ekonomi bawah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hambatan pemberdayaan politik di Kota Palu bersifat berlapis, tidak hanya berkaitan dengan aksesibilitas fisik, tetapi juga dengan ekonomi harian, perpindahan domisili pascabencana, keterbatasan informasi, dan lemahnya daya tawar warga.

Berbeda dengan penelitian Dewi et al. (2022) yang menekankan peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan meminimalkan golput, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pemilih belum cukup apabila tidak diikuti dengan pemberdayaan yang lebih dekat dengan kebutuhan kelompok marginal. Temuan ini memperkuat Pambayun et al. (2021) dan Ridwan et al. (2023) yang menyatakan bahwa literasi atau pendidikan politik dapat tersedia, tetapi belum efektif apabila jangkauan, metode, dan sarana pembelajarannya belum menyentuh sasaran secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa strategi pemberdayaan politik di Kota Palu perlu menggabungkan pendidikan politik tematik, pelayanan jemput bola, literasi kritis, dan kader komunitas agar partisipasi tidak berhenti pada prosedur memilih.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat marginal tidak selalu menolak politik atau tidak peduli terhadap politik. Banyak warga memahami bahwa memilih itu penting, tetapi mereka menghadapi hambatan praktis yang lebih mendesak. Pedagang pasar mempertimbangkan pendapatan harian, tukang parkir mempertimbangkan waktu kerja dan jarak TPS, warga Huntap mempertimbangkan akses informasi, dan penyandang disabilitas mempertimbangkan aksesibilitas. Artinya, rendahnya partisipasi harus dibaca secara lebih adil sebagai masalah struktur kesempatan, bukan sekadar masalah kesadaran warga.

Temuan menarik lainnya adalah adanya jarak antara sosialisasi politik dan pemberdayaan politik. Sosialisasi dapat membuat warga tahu jadwal pemilu atau pentingnya memilih, tetapi pemberdayaan menuntut proses yang lebih panjang. Warga perlu dilatih memahami isu publik, menyusun aspirasi, berbicara di forum, mengawasi janji politik, dan membangun jaringan. Tanpa proses tersebut, warga tetap berada pada posisi pasif meskipun pernah mengikuti kegiatan pendidikan politik.

Penelitian ini juga menemukan pentingnya pendekatan komunitas. Kelompok marginal lebih mudah dijangkau melalui orang yang mereka kenal, lokasi yang dekat, waktu yang sesuai, dan bahasa yang sederhana. Karena itu, kader warga marginal berbasis komunitas menjadi strategi penting. Kader bukan hanya perpanjangan tangan pemerintah, tetapi juga penjembatan antara pengalaman warga dan kebijakan publik. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi jarak antara lembaga formal dan masyarakat yang selama ini merasa suaranya kurang diperhatikan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan politik masyarakat marginal di Kota Palu harus diarahkan pada penguatan pilihan, agensi, dan partisipasi/prestasi secara berurutan. Pemberdayaan politik telah berjalan melalui KPU, Kesbangpol, FPK, dan FKDM, tetapi belum merata serta belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat marginal. Rendahnya partisipasi Pilkada dibandingkan Pemilu tidak cukup dijelaskan sebagai kurangnya kemauan memilih, karena hambatannya berkaitan dengan akses informasi, tekanan ekonomi, jarak hunian, disabilitas, relokasi pascabencana, dan lemahnya daya tawar warga. Strategi yang paling relevan adalah pendidikan politik tematik berbasis wilayah, *helpdesk* administrasi kependudukan dan pemilu keliling, literasi politik kritis dan kampanye antipolitik uang, serta *training of trainers* kader warga marginal berbasis komunitas. Keempat strategi tersebut diarahkan untuk mengubah masyarakat marginal dari objek sosialisasi menjadi subjek politik yang mampu memahami hak, menyuarakan aspirasi, menolak tekanan politik, dan memengaruhi kebijakan lokal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan, cakupan wilayah yang hanya berfokus pada Kota Palu, serta variasi kelompok marginal yang belum sepenuhnya terwakili secara seimbang. Pendekatan kualitatif deskriptif juga belum memungkinkan pengukuran kuantitatif terhadap besar pengaruh setiap faktor terhadap partisipasi politik masyarakat marginal.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work)*. Penulis menyarankan agar penelitian berikutnya memperluas jumlah informan, menambah variasi kelompok marginal, membandingkan beberapa kecamatan atau kota pascabencana, serta menggunakan metode campuran untuk mengukur efektivitas strategi pemberdayaan politik yang diusulkan. Penelitian lanjutan juga dapat menguji model kader warga marginal dalam meningkatkan partisipasi politik yang lebih bermakna.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Palu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palu, serta seluruh informan masyarakat marginal yang telah memberikan informasi, pengalaman, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, dan seluruh pihak yang membantu penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Bell, K., & Reed, M. (2021). The tree of participation: A new model for inclusive decision-making. *Community Development Journal*, *57*(4), 595–614. https://doi.org/10.1093/cdj/bsab018

Chandra SY, H., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *19*(4), 766–793. https://doi.org/10.31078/jk1942

Dahlum, S., Knutsen, C. H., & Mechkova, V. (2022). Women's political empowerment and economic growth. *World Development*, *156*(Article 105822). https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105822

Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, *8*(1), 36–47. https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082

Fitriyah, N. R. herawati. (2021). Aksesibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Sosial*, *20*(2), 209–227. https://doi.org/10.14710/jis.1.2.2021.209-227

Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, *66*(s1), 66–75. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x

Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. *IDS Bulletin*, *37*(6), 23–33. https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2006.tb00320.x

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, *30*(3), 1–26. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125

Mulyana, M., & Tambunan, C. J. (2021). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *11*(2), 240–262. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2259

Pambayun, K. G., Rani Apryani Pregiwati, & Rian Dwi Hapsari. (2021). Literasi politik pada wilayah eks daerah tertinggal Indonesia: Studi kasus Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *14*(2), 35–54. https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i2.1572

Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan informasi publik: Holistikasi dan akselerasi good governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *12*(2), 62–75. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911

Ridwan, P. U., Naseer, D. P. P., & Panab, J. (2023). Efektivitas kinerja Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam membangun tingkat pendidikan politik masyarakat pada Pilkada 2020 Kota Makassar. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, *5*(1), 19–30. https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3085

Rowlands, J. (1995). Empowerment examined. *Development in Practice*, *5*(2), 101–107. https://doi.org/10.1080/0961452951000157074

Sundstrom, A., Paxton, P., Wang, Y.-T., & I. Linderga, S. (2017). Women's political empowerment: A new global index, 1900–2012. *World Development*, *94*, 321–335.

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.01.016

Taek, M. M., Wasistiono, S., & Meltarini, M. (2020). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana desa di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, *5*(2), 83–102. https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i2.1324

